

**DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU*****DETERMINANTS OF POVERTY IN RIAU PROVINCE*****Tata Surya<sup>1)</sup>, Mahlil Andre Putra<sup>1)</sup>, Neng Kamarni<sup>1)</sup>**<sup>1)</sup> Magister Ekonomi Universitas Andalas Email: surya07909@gmail.com

**ABSTRAK;** Kemiskinan adalah permasalahan utama yang dihadapi negara berkembang. Kemiskinan yang tak terkendali akan mempengaruhi pembangunan suatu negara. Begitu juga dengan Provinsi Riau, sebagai salah satu provinsi kaya sumber daya alam tapi masih harus berhadapan dengan permasalahan kemiskinan yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau melalui Regresi data panel periode tahun 2017-2019. Hasil penelitian menyimpulkan variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Riau. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Riau.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi

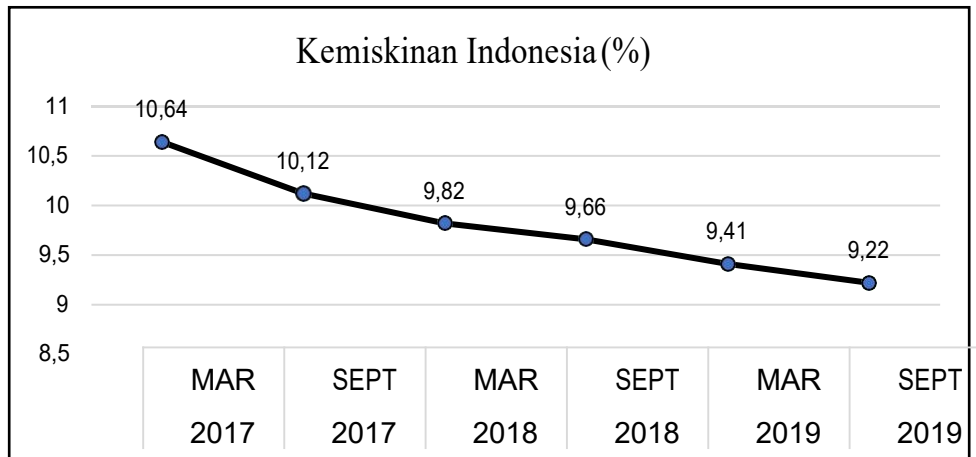
**ABSTRACT;** *Poverty is the main problem faced by developing countries. Uncontrolled poverty will affect the development of a country. Likewise with Riau Province, as one of the provinces rich in natural resources but still have to deal with the problem of poverty which is quite high. This study aims to examine the factors that affect poverty levels in Riau Province through the 2017- 2019 Panel Data Regression. The results of the study concluded that the economic growth variable and the unemployment rate had no significant influence on the percentage of poverty in Riau Province. Meanwhile, the human development index has a negative and significant influence on the percentage of poverty in Riau Province.*

**Keywords:** *poverty, human development index, unemployment, economic growth*

**A. PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama yang kompleks dan sering terjadi di negara-negara berkembang. Kemiskinan yang tidak tertangani akan menjadi faktor yang menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Sebagaimana yang dinyatakan Nurkse dalam Jhingan (2016) bahwa negara terbelakang terjatuh pada suatu “lingkaran setan kemiskinan”. Dalam pandangannya, lingkaran setan kemiskinan merupakan deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang saling beraksi dan bereaksi sehingga mengakibatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan miskin dan melarat.

Indonesia sebagai negara berkembang telah berupaya mengentaskan permasalahan kemiskinan yang melanda masyarakatnya. Gambar 1 memperlihatkan persentase kemiskinan secara nasional mengalami tren yang menurun dalam rentang periode tahun 2017-2019. Persentase tertinggi terjadi pada bulan Maret 2017 yaitu sebesar 10,64 persen dan mencapai titik terendahnya pada bulan September 2019 yaitu sebesar 9,22 persen. Data tersebut sepertinya menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah telah berjalan kepada arah implementasi yang tepat.



Sumber: BPS – Diolah

**Gambar 1.** Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2017-2019

Tingkat kemiskinan antar daerah bervariasi setiap tahunnya. Data publikasi BPS menunjukkan bahwa Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang cukup berhasil dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan. Data menunjukkan tingkat kemiskinan Provinsi Riau dalam periode 2017-2019 secara rata-rata berada di angka 7,42 persen dimana angka ini masih jauh lebih rendah dari tingkat kemiskinan rata-rata nasional yaitu dibawah 9,81 persen. Selain itu, Penurunan persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Riau juga sangat signifikan dibanding Provinsi – Provinsi lain yang berada dalam 12 besar Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional. Namun demikian hal ini masih kontradiktif dengan fakta bahwa Provinsi Riau merupakan provinsi dengan sumber daya alam minyak bumi yang berlimpah dan letak geografis yang strategis di zona perdagangan internasional Selat Malaka namun masih memiliki permasalahan kemiskinan dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki keterbatasan dalam aspek sumber daya alam dan letak geografis. Berikut ini disajikan tabel perbandingan tingkat kemiskinan antar daerah:

**Tabel 1.** Perbandingan Rata-Rata Tingkat Kemiskinan antar Daerah Tahun 2017-2019

No.	Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			Rata-Rata	Selisih Penurunan Tingkat Kemiskinan)*
		2017	2018	2019		
1	DKI Jakarta	3,77	3,57	3,47	3,60	-0,3
2	Bali	4,25	4,01	3,79	4,02	-0,46
3	Kalimantan Selatan	4,73	4,54	4,55	4,61	-0,18
4	Kep. Bangka Belitung	5,2	5,25	4,62	5,02	-0,58
5	Kalimantan Tengah	5,37	5,17	4,98	5,17	-0,39
6	Banten	5,45	5,24	5,09	5,26	-0,36
7	Kepulauan Riau	6,06	6,2	5,9	6,05	-0,16
8	Kalimantan Timur	6,19	6,03	5,94	6,05	-0,25
9	Maluku Utara	6,35	6,64	6,77	6,59	0,42
10	Kalimantan Utara	7,22	7,09	6,63	6,98	-0,59
11	Sumatera Barat	6,87	6,65	6,42	6,65	-0,45

12	Riau	7,78	7,39	7,08	7,42	-0,70
----	------	------	------	------	------	-------

)\* Selisih persentase kemiskinan ditahun 2019 dikurangi dengan perentase ditahun 2017.  
Sumber: BPS-Diolah

Tingkat kemiskinan suatu daerah disebabkan oleh berbagai macam faktor. Jhingan (2016) menyatakan bahwa lingkaran setan kemiskinan berasal dari rendahnya produktivitas total yang diakibatkan dari kekurangan modal, ketidaksempurnaan pasar, dan keterbelakangan perekonomian. Dalam pandangannya, Lingkaran setan kemiskinan ini dapat ditinjau dari sisi permintaan, sisi penawaran serta keterbelakangan manusia dan sumber daya alamnya. Jika ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran, ciri yang umum adalah tingkat pendapatan rendah yang menyebabkan investasi rendah dan kurangnya modal. Sedangkan dari sisi keterbelakangan manusia dan sumber daya alam berkaitan dengan kemampuan atau produktivitas manusia itu sendiri.

Penelitian untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan telah banyak dilakukan sebelumnya. Secara umum penelitian tersebut menggunakan variabel- variabel ekonomi dan sosial untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kemiskinan suatu daerah. Beberapa diantaranya yaitu penelitian Woyanti (2013) yang menyimpulkan bahwa upah minimum dan pertumbuhan ekonomi secara simultan dan parsial signifikan mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bintang dan Woyanti (2018) yang meneliti variable yang mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2011 hingga tahun 2015 memakai metode *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa PDRB dan Pengangguran mempengaruhi kemiskinan secara positif dan signifikan. Sedangkan tingkat harapan hidup dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian yang hampir serupa juga dilakukan oleh Andykha, Handayani & Woyanti (2018) dengan memakai metode *Fixed Effect Model* (FEM) dalam periode tahun 2011 hingga tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah, menyimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka dan laju pertumbuhan PDRB pengaruhnya positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan IPM mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Uraian mengenai gambaran umum dan latar belakang yang telah dijelaskan diatas menjadi dasar pertimbangan untuk dilakukannya penelitian yang sejenis. Penelitian ini akan mencoba menganalisis determinan kemiskinan dengan mengadaptasi variabel-variabel dalam penelitian sebelumnya namun dengan unit analisis yang berbeda yaitu Provinsi Riau. Adapun metode yang akan digunakan yaitu *Random Effect Model* (REM) dengan periode penelitian mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

## 1. Kemiskinan

Sjafrizal (2017) mendefinisikan tingkat kemiskinan sebagai persentase dari penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah. Dalam penjelasannya, Persentase tersebut dapat dihitung untuk berbagai tingkatan, baik daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, serta daerah administratif tingkat provinsi, hingga kabupaten dan kota. Adapun definisi dari penduduk miskin adalah golongan atau kelompok masyarakat yang jumlah pendapatannya belum dapat mencukupi kebutuhan mendasar dalam kehidupannya.

Tingkat kemiskinan dapat diukur melalui data persentase penduduk miskin disuatu daerah yang dipublikasikan oleh BPS. Tabel 2 dibawah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Riau setiap tahun mengalami tren penurunan dari angka 7,78 persen pada tahun 2017 menjadi 7,08 persen pada tahun 2019. Ditinjau dari Kabupaten/Kota pada tahun 2019, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 26,93 persen, sedangkan Kota Pekanbaru

merupakan Kota dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu 2,52 persen. Adapun data persentase penduduk miskin Provinsi Riau ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2017-2019

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Kab/Kot) (Persen)		
		2017	2018	2019
1	Kuantan Singingi	9.97	9.92	9.56
2	Indragiri Hulu	6.94	6.30	6.06
3	Indragiri Hilir	7.70	7.05	6.54
4	Pelalawan	10.25	9.73	9.62
5	Siak	5.80	5.44	5.03
6	Kampar	8.02	8.18	7.71
7	Rokan Hulu	10.91	10.95	10.53
8	Bengkalis	6.85	6.22	6.27
9	Rokan Hilir	7.88	7.06	7.01
10	Kepulauan Meranti	28.99	27.79	26.93
11	Pekanbaru	3.05	2.85	2.52
12	Dumai	4.57	3.71	3.56
13	RIAU	7.78	7.39	7.08

Sumber: BPS - Diolah

## 2. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah keterbelakangan manusia dan rendahnya produktivitas (Jhingan, 2016). Kualitas manusia yang rendah membuat produktivitas menjadi rendah dan diperkirakan akan menghasilkan pendapatan yang rendah pula. Sebaliknya, kualitas manusia yang tinggi, diantaranya dalam hal pendidikan, pengetahuan dan keterampilan diperkirakan akan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi pula untuk menghasilkan pendapatan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengkombinasikan tiga unsur kemakmuran dalam suatu masyarakat, yang terdiri dari unsur daya beli (pendapatan), pendidikan dan kesehatan masyarakat (Sjafrizal, 2017). Angka IPM dipublikasikan oleh BPS secara tahunan baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional sebagai salah satu indikator kualitas hidup masyarakat. BPS sendiri mempublikasikan nilai IPM menjadi tiga jenis, yaitu IPM tingkat Nasional, IPM tingkat Provinsi dan IPM tingkat Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2017, tingkat IPM Provinsi Riau berada di angka 71,79 persen dan mengalami peningkatan menjadi 73,00 persen di tahun 2019. Kota Pekanbaru merupakan kota dengan IPM tertinggi ditahun 2019 yaitu 81,35 persen. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan nilai IPM terendah yaitu 65,93 persen.

## 3. Tingkat Pengangguran

Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat diukur melalui tingkat penganggurannya. Tingginya Tingkat pengangguran mengindikasikan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, demikian pula sebaliknya (Sjafrizal, 2017). Pengangguran ada kaitannya dengan kemiskinan, dimana seseorang yang menganggur dianggap tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengetahui tingkat pengangguran daerah, dapat dilihat melalui data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang telah dipublikasikan oleh

BPS. BPS (2022a) mendefinisikan TPT sebagai persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan Kerja pada satu waktu tertentu.

Data TPT Provinsi Riau menunjukkan tren yang menurun setiap tahun. Pada tahun 2017, TPT Provinsi Riau berada diangka 6,22 persen dan turun menjadi 5,76 persen di tahun 2019. Kabupaten yang memiliki TPT tertinggi yaitu Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar 9,28 persen di tahun 2019. Sedangkan Kabupaten Siak merupakan Kabupaten dengan angka TPT terendah yaitu 4,13 persen di tahun 2019.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi riil barang dan jasa atau PDRB pada suatu periode tertentu (Sjafrizal, 2017). Dalam kaitannya dengan kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghasilkan pendapatan per kapita yang tinggi sekaligus diperkirakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Nilai PDRB daerah dapat dilihat dari publikasi yang dikeluarkan oleh BPS. BPS (2022b) mendefinisikan PDRB sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Nilai PDRB dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun perhitungannya menggunakan jenis PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau secara umum mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau berada di angka 2,66 persen pada tahun 2017 dan menurun menjadi 2,35 persen pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau kembali mengalami peningkatan menjadi 2,81%. Kota Pekanbaru merupakan Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 5,99 persen ditahun 2019 sedangkan Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya Kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama periode 2017-2019. Pada tahun 2019 Kabupaten Bengkalis mengalami kontraksi sebesar -1,89 persen.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu:

### 1. Analisis deskriptif

Digunakan untuk mengetahui gambaran kemiskinan melalui penjelasan dengan menggunakan diagram, tabel ataupun grafik, serta menjelaskan beberapa variable yang determinan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

### 2. Analisis data panel

Analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana determinan variable bebas yang digunakan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Data panel merupakan penggabungan cross section data yang merupakan unit data yang sama dengan melihatnya dalam periode/jangka waktu tertentu (time series data).

Untuk melihat pengaruh independen variabel terhadap variabel dependennya, yaitu persentase Kemiskinan di Provinsi Riau, data yang digunakan dalam penelitian yaitu data dari populasi 12 Kota/Kabupaten di Provinsi Riau periode tahun 2017 hingga tahun 2019. Dengan menggunakan persamaan regresi berikut ini:

$$Povit = B_0 + B_1HDI_{it} + B_2Unemp_{it} + B_3Growth_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

*Pov* : Persentase Kemiskinan  
*HDI* : Indeks Pembangunan Manusia  
*Unemp* : Tingkat

Pengangguran *Growth* :  
 Pertumbuhan Ekonomi  
 $i$  : Kota/Kabupaten di Provinsi Riau  
 $t$  : Periode waktu (2017-2019)  
 $\epsilon_{it}$  : *error term*

Program Eviews 9 digunakan untuk mengolah data panel sebagaimana persamaan regresi diatas. Adapun metode regresi data panel terdiri dari:

- Common Effect Model (CEM)* yaitu model yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Model regresi CEM adalah *Ordinary Least Square (OLS)*.
- Fixed Effect Model (FEM)* yaitu model dengan intersep setiap entitas tidak bervariasi dari waktu ke waktu, atau, waktu-invarian. Namun untuk memperhitungkan intersep yang berbeda dapat menggunakan *variable dummy*, model ini dikenal dengan *Least Square Dummy Variabel (LSDV)* (Gujarati & Porter, 2009).
- Random Effect Model (REM)* atau *Error Component Model (ECM)* yaitu model dengan intersep dari unit individu merupakan penarikan dari populasi secara acak yang lebih besar dengan nilai rata-rata yang konstan (Gujarati & Porter, 2009). Model regresi REM adalah *Generalized Least Square (GLS)*.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Spesifikasi model

Dalam uji regresi panel data, memilih model penelitian yang tepat dilakukan terlebih dahulu sebelum menganalisis hasil estimasi antara model *Common Effect*, *Fixed Effect* atau *Random Effect Models*. Agar mendapatkan pilihan model terbaik maka perlu dilakukan *hausman test*, *Chow test*, dan *Lagrange Multiplier test*. Proses pemilihan model dilakukan dalam tiga tahap, tahap pertama adalah membandingkan antara *Common Effects Model* dan *Fixed Effect Models* dengan menggunakan uji Chow, selanjutnya *Fixed Effect Models* dan *Random Effect Models* dengan uji Hausman dan yang ketiga adalah membandingkan *Common Effects* dan *Random Effect Models* menggunakan uji *lagrange multiplier*.

**Tabel 3.** Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	869,939286	-11,21	0.0000
Cross-section Chi-square	220,463581	11	0.0000

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa  $H_0$  (*Common Effects Model*) ditolak yang artinya terdapat heterogenitas dalam model yang terlihat dengan nilai probabilitas Cross section F 0,0000 dengan nilai  $< 0,05$  oleh karena itu dapat dikatakan model *Fixed Effect* lebih baik digunakan dari pada *Common Effect*.

Pada tahap pertama diperoleh *Fixed Effects Model* sebagai model terbaik, selanjutnya kami melakukan uji hausman untuk melihat pilihan terbaik antara *Fixed Effects Model* atau *Random Effects Model*.

**Tabel 4.** Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2,234709	3	0.5251

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai *probabilty* yang dihasilkan pada uji *Hausman* adalah sebesar 0.5251 lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan *Random Effects Model* sebagai pilihan model terbaik. Hal ini dapat diartikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat (kemiskinan) memiliki heterogenitas individu secara random. Sehingga *Random Effect Model* lebih tepat digunakan.

Langkah ketiga adalah menentukan *Common Effects model* atau *Random Effects model* yang merupakan pilihan terbaik dengan melakukan uji *Lagrange Multiplier*. Dari hasil uji *Lagrange Multiplier*, yang menjadi model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effects Model* pada tingkat signifikan 5 persen.

**Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier**

	Cross-section	Test Hypothesis	Both
Breusch-Pagan	31.44071 1 (0.0000)	Time 1.207384 32 (0.2719)	64810 (0.0000)
Honda	5.607202 - (0.0000)	-1.098810 3	187914 (0.0007)
King-Wu	5.607202 - (0.0000)	-- -1.098810 1	188567 (0.1173)
Standardized Honda	6.677048 - (0.0000)	-- -0.856811 1	42557 (0.1486)
Standardized King-Wu	6.677048 - (0.0000)	-- -0.856811 -	.699761 --
Gourierieux, et al.*	--	--	144.071 (< 0.01)

Sumber : Sumber: Data diolah, 2022

Dari tiga tahap pengujian pemilihan model estimasi di atas diperoleh *Random Effects Model* sebagai pilihan terbaik. Menurut Gujarati & Porter (2009) *Random Effects Model* merupakan *Generalized Least Square (GLS)* sehingga tidak memerlukan uji asumsi klasik. Dalam penjelasan Hazmi, Ayu & Kamarni (2021) bahwa ketika model yang terpilih adalah *random effect model* maka tidak perlu lagi dilakukan uji asumsi klasik, karena estimasi *Random Effects Model* merupakan *Generalized Least Square (GLS)* yang telah melibatkan *varians covarians* didalam proses estimasi, sehingga *Random Effects Model* sudah *generalized*.

## 2. Hasil Estimasi Model

Dari table 6 dapat dilihat bahwa hasil estimasi diperoleh nilai probabilitas F statistic nya sebesar 0,0000 dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 persen, artinya dapat disimpulkan

bahwa *Random Effects Model* merupakan model yang tepat untuk digunakan. Hasil estimasi menunjukan nilai koefisien determinasi *R-squared* adalah 0,6553 yang berarti bahwa sebesar 65,53 persen variable-variabel bebas yang digunakan dalam model telah mampu menjelaskan variasi variable dengan baik, dan sisanya sebesar 34,47 persen dijelaskan oleh variable lain yang tidak disertakan dalam model.

**Tabel 6. Hasil Estimasi *Random Effects Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.143.695	7.073.969	8.684.934	0.0000
X1	-0.727300	0.094670	-7.682.509	0.0000
X2	-0.122857	0.071943	-1.707.705	0.0974
X3	-0.034024	0.103840	-0.327653	0.7453
R-squared		0,655293		
Prob(F-statistic)		0,000000		

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan nilai probabilitas yang ditunjukkan dalam table 6 variable Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) berpengaruh negatif namun tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Hasil ini berbeda dari penelitian Andykha, Handayani & Woyanti (2018) yang menyimpulkan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun hasil yang serupa dapat terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Faradila & Imaningsih (2022) dan Wulandari (2020). Hal ini disebabkan oleh ketersediaan lapangan pekerjaan tidak cocok dengan kompetensi yang ada serta anggota keluarga yang menganggur ditanggung anggota keluarga lain yang berpendapatan tinggi akibatnya kebutuhan mereka terpenuhi dan tidak digolongkan sebagai penduduk miskin.

Pertumbuhan Ekonomi (X3) yang diprosikan dengan PDRB juga negatif serta tidak signifikan mempengaruhi penurunan persentase kemiskinan yang terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,745. Hal ini bisa diartikan bahwa, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau hanya dinikmati oleh kelompok dengan pendapatan tinggi, tidak merata pada kelompok dengan pendapatan rendah atau tergolong miskin. Hasil ini juga berbeda dari penelitian Andykha, Handayani & Woyanti (2018) yang menyimpulkan laju PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Namun sejalan dengan hasil penelitian Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (X1) memiliki pengaruh yang negatif serta signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat kepercayaan 1%. Kemiskinan di Provinsi Riau akan mengalami penurunan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Kenaikan 1 poin pada Indeks pembangunan manusia menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0,73%. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian yang ada sebelumnya. Andykha, Handayani & Woyanti (2018) menyatakan IPM memiliki pengaruh yang negatif dan juga signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sari, Resina & Kamarni (2021) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan pada penurunan persentase kemiskinan, kemudian ada juga penelitian oleh Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) dengan menggunakan analisis jalur menemukan bahwa IPM berpengaruh langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan.



## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Persentase tingkat kemiskinan Provinsi Riau dari tahun ketahun menunjukkan tren penurunan, yang artinya terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang negatif dan juga signifikan terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Riau. Artinya, ketika Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, maka persentase kemiskinan akan turun. Sementara itu, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Riau walaupun memiliki koefisien yang negatif. Sehingga secara keseluruhan dari hasil penelitian ini, hanya IPM yang memiliki pengaruh secara statistik terhadap penurunan persentase kemiskinan di provinsi Riau.

### 2. Saran

Karena keterbatasan data, maka dalam penelitian ini hanya digunakan data kemiskinan, IPM, PDRB dan Tingkat Pengangguran Terbuka 3 tahun terakhir saja, yaitu 2017-2019. Untuk penelitian selanjutnya kami menyarankan agar dapat menambah jumlah tahun penelitian dan menambahkan variable-variable lain diluar model penelitian ini agar diperoleh hasil penelitian yang lebih beragam, karena dari hasil penelitian masih terdapat 34,47 persen kemungkinan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh variable-variabel lainnya yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 33 No. 2, Juli 2018, 113-123.*
- Bintang, A. B., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 33 No. 1 Januari 2018.*
- BPS. (2022a). <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44>. BPS. (2022b). <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/4>.
- Faradila, S., & Imaningsih, N. (2022). Faktor-Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sampang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 5(1), 545-552.*
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics Fifth Edition*. The McGraw-Hill Companies.
- Hazmi, D. M., Ayu, F., & Kamarni, N. (2021). Penanaman Modal Asing dan Demokrasi: Analisis Data Panel Provinsi-Provinsi di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 16 No. 2 April - Juni 2021.*
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium, 6(2), 217-240.*
- Sari, C. R., Resina, D., & Kamarni, N. (2021). Analisis Indikator Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic, 5(1), 1-7.*
- Sjafrizal. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. PT Rajagrafindo Persada. Woyanti, N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMP terhadap

Kemiskinan di Jawa Tengah

Pra dan Pasca Desentralisasi Fiskal. *Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 28 No. 2 Juli 2013*.

Wulandari, G. A. (2020). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bangka Tahun 2009-2018. *Jurnal Manajemen Kompeten*, 23-34.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.riau.bps.go.id](http://www.riau.bps.go.id)